

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat Wilayah yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan Tingkat Wilayah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tingkat Wilayah.

Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan Tingkat Wilayah ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Tingkat Wilayah ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Di samping itu, Laporan Keuangan Tingkat Wilayah ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Jakarta, 08 Mei 2024

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

R. Andika Dwi Prasetya

NIP. 196712171991031002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan Tingkat Wilayah	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	34
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	49
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	56
F. Pengungkapan Penting Lainnya	60
VI. Lampiran – lampiran	64



## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta DIPA Administrasi Hukum Umum yang terdiri atas : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tingkat Wilayah tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jakarta, 08 Mei 2024  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
R. Andika Dwi Prasetya  
NIP. 196712171991031002

Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Semester II Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan Tingkat Wilayah ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 18.611.111,- atau mencapai 100 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 0,-

Realisasi Belanja Negara pada Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited adalah sebesar Rp. 12.449.998.267,- atau mencapai 95 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 13.071.395.000,-

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 102.074.948.208,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 92.387.365.328,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0.; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 9.657.588.003; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 29.994.877,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 92.315.956.860,- dan Rp. 9.758.991.348

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah

sebesar Rp. 12.908.259.462,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (12.908.259.462),- Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 18,611,111,- dan sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (12,889,648,351),-

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp. 10.127.155.893,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (12.889.648.351),- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 12.521.483.806,-, penurunan ekuitas sebesar (368.164.545), sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 9.758.991.348,-.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TINGKAT WILAYAH**

Catatan atas Laporan Keuangan Tingkat Wilayah (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan Tingkat Wilayah.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CAT	TAHUN ANGGARAN 2023		Realisasi di Atas (Dibawah)	%	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI			REALISASI
		<b>PENDAPATAN</b>				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	2.986.706.122	2.986.706.122		2.986.706.122
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>-</b>	<b>2.986.706.122</b>			
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>					
Belanja Pegawai	B.3	2.465.764.000	2.187.972.234	(64.036.336)	97,00	2.178.879.664
Belanja Barang	B.4	9.622.641.000	9.341.061.633	(718.885.322)	93,00	9.471.352.678
Belanja Modal	B.5	982.990.000	920.964.400	(205.756.473)	96,00	5.058.215.527
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-			-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>13.071.395.000</b>	<b>12.449.998.267</b>	<b>(988.678.131)</b>	<b>95,25</b>	<b>16.708.447.869</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan Tingkat Wilayah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Tingkat Wilayah**

**II. NERACA**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	<b>C1</b>		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	92.315.956.860	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.1.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.1.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.1.8	-	362.280.694
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.1.9	-	-
Persediaan	C.1.10	71.408.468	111.143.632
Jumlah Aset Lancar		92.387.365.328	473.424.326
<b>ASET TETAP</b>	<b>C.2</b>		
Tanah	C.2.1	-	-
Peralatan dan Mesin	C.2.2	5.195.589.232	4.719.604.693
Gedung dan Bangunan	C.2.3	8.718.306.624	8.718.306.624
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(4.256.307.853)	(3.821.820.375)
Jumlah Aset Tetap		9.657.588.003	9.616.090.942
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	<b>C.3</b>		
Piutang Tagihan TP/TGR	C.3.1	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.3.3	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>C.4</b>		
Aset Tidak Berwujud	C.4.1	60.225.000	60.225.000
Aset Lain-Lain	C.4.2	482.635.861	63.256.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	(512.865.984)	(85.840.375)
Jumlah Aset Lainnya		29.994.877	37.640.625
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>102.074.948.208</b>	<b>10.127.155.893</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>C.5</b>		
Uang Muka dari KPPN	C.5.1	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	92.315.956.860	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.5.3	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.5.4	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		92.315.956.860	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>92.315.956.860</b>	<b>-</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.6	9.758.991.348	10.127.155.893
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>9.758.991.348</b>	<b>10.127.155.893</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>102.074.948.208</b>	<b>10.127.155.893</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan Tingkat Wilayah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Tingkat Wilayah**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	TA 2023	TA 2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	2.823.251.484
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>2.823.251.484</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	2.187.972.234	2.178.879.664
Beban Persediaan	D.3	201.335.204	161.290.752
Beban Barang dan Jasa	D.4	5.398.926.184	5.836.680.389
Beban Pemeliharaan	D.5	505.605.830	369.629.878
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3.727.306.923	2.735.607.422
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	887.113.087	646.195.710
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>12.908.259.462</b>	<b>11.928.283.815</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(12.908.259.462)</b>	<b>(9.105.032.331)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		18.611.111	154.268.198
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		18.611.111	163.454.618
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	9.186.420
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	20
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	20
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
<b>JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>18.611.111</b>	<b>154.268.218</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(12.889.648.351)</b>	<b>(8.950.764.113)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(12.889.648.351)</b>	<b>(8.950.764.113)</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan Tingkat Wilayah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Tingkat Wilayah**



**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CAT	TA 2023	TA 2022
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	10.127.155.893	5.356.178.259
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(12.889.648.351)	(8.950.764.113)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	-
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	12.521.483.806	13.721.741.747
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(368.164.545)	4.770.977.634
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	<b>9.758.991.348</b>	<b>10.127.155.893</b>

***Catatan atas Laporan Keuangan Tingkat Wilayah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Tingkat Wilayah***

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis* Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah merupakan perubahan nama dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman pertama kali dibentuk pada tahun 1982 yang keberadaannya diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.03.PR07.10 Tahun 1982 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-03.PR-07.10 Tahun 1992.

Kantor Wilayah pada saat itu meliputi wilayah Tangerang dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN). Kemudian untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Tangerang diserahkan kepada Kantor Wilayah Jawa Barat dan kemudian dibentuk pula Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: A.325.KP.04.04 Tahun 2001 tanggal 1 Maret 2001

Pada saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah terdiri atas beberapa Divisi. Divisi-divisi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. *Divisi Administrasi*, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan teknis dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan

oleh Sekretaris Jenderal;

2. *Divisi Pemasyarakatan*, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah;
3. *Divisi Keimigrasian*, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah;
4. *Divisi Pelayanan Hukum dan HAM*, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal atau Badan terkait di wilayah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor : M.HH-03.PR.01.04 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 terdapat perubahan identitas entitas akuntansi. Satuan kerja perwakilan imigrasi dan unit pelaksana teknis (UPT) di daerah mengalami perubahan kode Satuan kerja dan kode Eselon I dari semula :

1. 01 (Sekretariat Jenderal) menjadi 03 (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) untuk UPT Administrasi Hukum Umum (Balai Harta Peninggalan);
2. 01 (Sekretariat Jenderal) menjadi 05 (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) untuk UPT Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara);
- 01 (Sekretariat Jenderal) menjadi 06 (Direktorat Jenderal Imigrasi) untuk UPT Keimigrasian (Perwakilan Imigrasi, Kantor Imigrasi dan Rumah Deteni Imigrasi).

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan  
Tingkat  
Wilayah*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah**

Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (Administrasi Hukum Umum). Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

### *Basis*

#### **A.3. Basis Akuntansi**

### *Akuntansi*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (Administrasi Hukum Umum) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### *Dasar*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

### *Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Tingkat Wilayah. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (Administrasi Hukum Umum) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tingkat Wilayah adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban

dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan Tingkat Wilayah menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

**A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tingkat Wilayah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan Tingkat Wilayah ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Tingkat Wilayah. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (Administrasi Hukum Umum) adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Pendapatan-LO* (2) **Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Tingkat Wilayah adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja* (3) **Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tingkat Wilayah.

## *Beban*

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tingkat Wilayah.



## Aset

### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## Aset

### Lancar

#### a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%

Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*      **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset  
Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa

nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## *Kewajiban* (6) **Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penjelasan atas Pos  
Laporan Realisasi  
Anggaran

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (Administrasi Hukum Umum) telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 3 kali dari DIPA Awal.

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2023

Uraian	TAHUN ANGGARAN 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan	-	-
Pendapatan PNB	-	18.611.111
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>-</b>	<b>18.611.111</b>
Belanja		
Belanja Pegawai	2.465.764.000	2.187.972.234
Belanja Barang	9.622.641.000	9.341.061.633
Belanja Modal	982.990.000	920.964.400
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>13.071.395.000</b>	<b>12.449.998.267</b>

Realisasi  
Pendapatan  
Rp.18.611.111,-

### B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 18.611.111,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang

ditetapkan sebesar Rp.0,-.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Semester II  
Tahun Anggaran 2023 Audited*

Uraian	TAHUN ANGGARAN 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	18.611.111	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	
Pendapatan Lain-lain	-	-	
<b>Jumlah</b>	-	<b>18.611.111</b>	

Realisasi Pendapatan *Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited* mengalami penurunan pendapatan sebesar 0 persen dikarenakan pada TA 2023 tidak terdapat target Pendapatan bila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Semester II Tahun Anggaran 2022.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II Tahun  
Anggaran 2023 Audited dan 2021*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	18.611.111	163.454.618	
Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	-	2.816.484.402	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	2.823.251.484	
Pendapatan Lain-lain	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>18.611.111</b>	<b>5.803.190.504</b>	

*Realisasi Belanja*

**B.2. BELANJA**



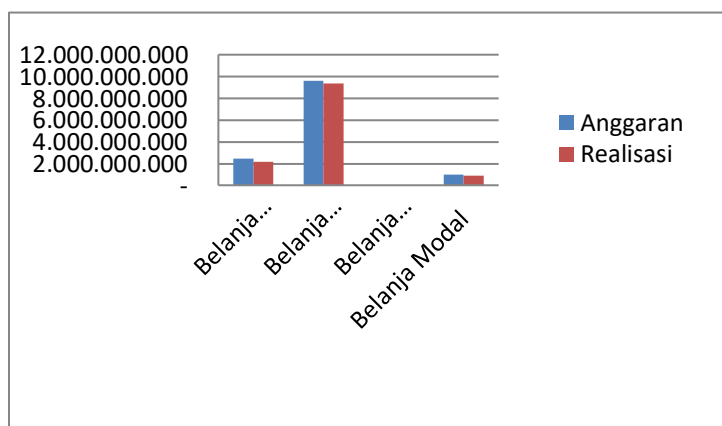
Negara Rp.  
12.449.998.267,-

Realisasi Belanja pada Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited adalah sebesar Rp. 12.449.998.267,- atau 95,25 persen dari anggaran belanja sebesar Rp. 13.071.395.000,- Rincian anggaran dan Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited tersaji sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Rincian Anggaran Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited*

Uraian	TAHUN ANGGARAN 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2.465.764.000	2.187.972.556	88,73
Belanja Barang	9.622.641.000	9.345.571.633	97,12
Belanja Bantuan Sosial	0	0	
Belanja Modal	982.990.000	920.964.400	93,69
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>13.071.395.000</b>	<b>12.454.508.589</b>	<b>95,28</b>
Pengembalian Belanja	-	4.510.322	
<b>Total Belanja</b>	<b>13.071.395.000</b>	<b>12.449.998.267</b>	<b>95,25</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited mengalami Kenaikan sebesar 1 persen dibandingkan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2022 karena terdapat penurunan Pagu DIPA

*Perbandingan Realisasi Belanja Semester II Tahun Anggaran  
2023 Audited dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.187.972.234	2.178.879.664	0,42
Belanja Barang	9.341.061.633	9.471.352.678	(1,38)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
Belanja Modal	920.964.400	5.058.215.527	(81,79)
<b>Jumlah</b>	<b>12.449.998.267</b>	<b>16.708.447.869</b>	<b>(25,49)</b>

*Belanja Pegawai  
Rp.2.187.972.234,-*

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.2.187.972.234,- dan Rp. 2.178.879.664,-.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited adalah Rp.0 Hal ini disebabkan antara lain oleh Adanya restrukturisasi program dan kegiatan pada Tahun 2022 yang mempengaruhi memunculkan DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (Administrasi Hukum Umum). Dan tidak memiliki belanja pegawai dalam uraian DIPA tersebut.

*Perbandingan Belanja Pegawai Semester II Tahun Anggaran  
2023 Audited dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.173.004.556	2.204.190.860	
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium			-
Belanja Lembur	14.968.000	17.349.000	
Belanja Vakasi	-	-	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2.187.972.556</b>	<b>2.221.539.860</b>	
Pengembalian Belanja Pegawai	322	42.660.196	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.187.972.878</b>	<b>2.178.879.664</b>	

*Belanja Barang* **B.4 Belanja Barang**

*Rp.9.341.061.633,-*

Realisasi Belanja Barang Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.341.061.633,- dan Rp. 9.471.352.678,- Realisasi Belanja Barang Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited mengalami mengalami kenaikan sebesar 44,97 Persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Barang Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.097.022.798	1.087.400.948	0,88
Belanja Barang Non Operasional	1.901.385.803	1.812.136.515	4,93
Belanja Jasa	2.039.236.889	3.299.423.620	(38,19)
Belanja Pemeliharaan	499.110.222	386.050.958	29,29
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.730.816.923	2.735.607.422	36,38
Belanja Barang Persediaan	77.998.998	150.733.215	(48,25)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>9.345.571.633</b>	<b>9.471.352.678</b>	<b>(1,33)</b>
Pengembalian Belanja	4.510.000	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.341.061.633</b>	<b>9.471.352.678</b>	<b>(1,38)</b>

*Belanja Modal* **B.5 Belanja Modal**

*Rp.920.964.400,-*

Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.

920.964.400,- dan Rp. 5.058.215.527,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited mengalami penurunan dibandingkan TA 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	920.964.400	879.239.188	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	4.178.976.339	
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	
Belanja Modal Lainnya	0	0	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>920.964.400</b>	<b>5.058.215.527</b>	
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>920.964.400</b>	<b>5.058.215.527</b>	

*Belanja Modal  
Tanah Rp.0,-*

### **B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Tanah pada Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited maupun Tahun Anggaran 2022.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin  
Rp.920.964.400,-*

### **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited adalah sebesar Rp. 920.964.400,-, tidak ada perubahan bila dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 879.239.188,-.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	920.964.400	879.239.188	
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>920.964.400</b>	<b>3.840.365.505</b>	
Pengembalian	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>920.964.400</b>	<b>3.840.365.505</b>	

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.0,-*

### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 4.178.976.339,-. Realisasi belanja Modal gedung dan bangunan Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited tidak mengalami perubahan, Hal ini dikarenakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Program DIPA AHU Tahun Anggaran 2023 tidak mempunyai pagu anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	920.964.400	879.239.188	
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>920.964.400</b>	<b>879.239.188</b>	
Pengembalian Belanja Modal	0	0	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>920.964.400</b>	<b>879.239.188</b>	

*Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan*

### **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rp.0,-

Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited tidak mengalami perubahan dibandingkan realisasi anggaran TA 2022. Hal ini dikarenakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Program DIPA AHU TA 2023 tidak mempunyai pagu anggaran belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2023	T.A 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Belanja Modal Lainnya*  
Rp.123.481.000,-

**B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.123.481.000,- dan Rp.1.099.497.065,-. Realisasi Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Hal ini dikarenakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Program DIPA AHU Tahun Anggaran 2022 tidak mempunyai pagu anggaran belanja modal lainnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya  
Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2023	T.A 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	0	123.481.000	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>123.481.000</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>123.481.000</b>	<b>0,00</b>

*Belanja  
Bantuan Sosial  
Rp.0,-*

**B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited maupun Tahun Anggaran 2022. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester II  
Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A 2022	NAIK (TURUN) %
Penerima Bantuan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta	0	0	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Pengembalian	0	0	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## **C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

### *Aset Lancar*

*Rp. 92.387.365.328,-*

### **C.1. Aset Lancar**

Jumlah Aset Lancar pada Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta DIPA AHU per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 92.387.365.328,- dan Rp. 473.424.326,- . Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

### *Kas di*

### *Bendahara*

### *Pengeluaran*

*Rp. 0,-*

### **C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Uang pada rekening bendahara pengeluaran dengan nomor rekening 65-089-408-721-100-0 senilai Rp. 0,- dan senilai Rp. 0,- pada brankas bendahara dan senilai Rp. 0,- dalam bentuk kwitansi UP, Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

Keterangan	TA 2023	TA 2022
uang tunai	-	-
rekening bank	-	-
Kwitansi UP	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp.0,-*

### **C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan  
Per Desember 2023 dan 2022*

Keterangan	TA 2023	TA 2022
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas Rp.  
92.315.956.860,-*

### **C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 92.315.956.860,- dan Rp.0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan yaitu berupa Pengembalian Kelebihan Pembayaran LS Pada Bendahara Pengeluaran yang disetor setelah Tahun

Berjalan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas*

Keterangan	TA 2023	TA 2022
uang pihak ketiga dan pailit (BHP Jakarta)	92.315.956.860	-
<b>Jumlah</b>	<b>92.315.956.860</b>	<b>-</b>

*Piutang Bukan Pajak Rp.0,-*

**C.1.4 Piutang Bukan Pajak**

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBPN disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNBPN*

Uraian	TA 2023	TA 2022
Piutang PNBPN	-	-
Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Bagian Lancar TP/TGR Rp.0,-*

**C.1.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR*

No	Debitur per Satker	TA 2023	TA 2022
		-	-
Jumlah		-	-

*Bagian Lancar  
TPA Rp.0,-*

**C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Bagian Lancar TPA*

No	Debitur per Satker	TA 2023	TA 2022
		-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang Lancar  
Rp.0,-*

**C.1.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Penyisihan piutang takterttagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

*Belanja Dibayar di Muka Rp. 0-* **C.1.8 Beban Dibayar di Muka**

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 362.280.694,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Dibayar di Muka*

Jenis	TA 2023	TA 2022
Sewa Gedung	-	362.280.694
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>362.280.694</b>

*Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp.0,-* **C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang masih harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022*

Jenis	TA 2023	TA 2022
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Persediaan*

*Rp.71.408.468,-*

**C.1.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.71.408.468,- dan Rp. 111.143.632,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan*

Persediaan	TA 2023	TA 2022
Barang Konsumsi	56.183.347	111.143.632
Amunisi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	15.225.121	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan untuk Tujuan Strategis/berjaga-jaga	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>71.408.468</b>	<b>111.143.632</b>

*Aset Tetap Rp.*

*9.567.588.003,-*

## **C.2 Aset Tetap**

Saldo Aset Tetap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per 31 Desember 2023 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 9.657.588.003,- dan Rp. 9.616.090.942,-

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (Administrasi Hukum Umum) berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

*Tanah Rp. 0,-*

### **C.2.1 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (Administrasi Hukum Umum) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:		
Transfer Keluar	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>

*Peralatan dan Mesin*

*Rp. 5.195.589.232,-*

### **C.2.2 Peralatan dan Mesin**

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per

31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.195.589.232,- dan Rp. 4.719.604.693,-. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	5.195.589.232
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk		
Pengembangan Nilai Aset	Rp	-
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	Rp	-
Mutasi kurang:		
Transfer Keluar		
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	-
jumlah mutasi	Rp	5.195.589.232
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>5.195.589.232</b>

*Gedung dan*

*Bangunan*

*Rp.8.718.306.624,-*

### **C.2.3 Gedung dan Bangunan**

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp,- dan Rp. 8.718.306.624,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>8.718.306.624</b>
Mutasi tambah:	-
Pembangunan Gedung	
Koreksi pencatatan	-
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>8.718.306.624</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>8.718.306.624</b>

*Jalan, Irigasi*

*dan Jaringan*

*Rp. 0,-*

### **C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-.



Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	-
Mutasi tambah: Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi kurang: Transfer Keluar	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	-

*Aset Tetap  
Lainnya Rp. 0,-*

### **C.2.5 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 0,- dan Rp.0,-. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	-
Mutasi tambah: Pembelian	-
Mutasi kurang: Transfer Keluar	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	-

*Konstruksi  
dalam  
Pengerjaan  
Rp.0,-*

### **C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan*

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
		-	-	0	
	<b>Jumlah</b>	-		-	

*Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp.0,-*

### **C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp. (4.256.307.853),- dan Rp. (3.821.820.375),-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan Tingkat Wilayah ini.

#### *Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 5.195.589.232	Rp 3.405.828.612	Rp 1.789.760.620
2	Gedung dan Bangunan	Rp 8.718.306.624	Rp 850.479.241	Rp 7.867.827.383
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -
4	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Rp 13.913.895.856</b>	<b>Rp 4.256.307.853</b>	<b>Rp 9.657.588.003</b>

*Piutang Jangka  
Panjang Rp. 0,-*

### **C.3 Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Kantor Akuntansi Bogor merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

### C.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Piutang Tagihan  
Tuntutan  
Perbendaharaan / Tuntutan  
Ganti Rugi  
(TP/TGR) Rp. 0,-*

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per 31 Desember 2023 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2023 dan 2022*

No	Debitur	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -
2	Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -
4	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>

### C.3.2 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

*Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp. 0,-*

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Rincian TPA untuk Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA*

No	Debitur	T A 2023	T A 2022
		-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang Rp. 0,-*

**C.3.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>		-	-

*Aset Lainnya  
Rp.29.994.877,-*

**C.4 Aset Lainnya**

Saldo Aset Lainnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 29.994.877,- dan Rp 37.640.625,-.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

*Aset Tak Berwujud*  
*Rp.60.225.000,-*

#### **C.4.1 Aset Tak Berwujud**

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 60.225.000,- dan Rp. 60.255.000,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Aset Tak berwujud*

Uraian	Nilai
Software Komputer	60.225.000
	<b>60.225.000</b>

Mutasi:

<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	Rp	-
<b>Mutasi tambah:</b>	Rp	60.225.000
Transfer Masuk		
<b>Mutasi kurang:</b>		
Transfer keluar		
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	Rp	<b>60.255.000</b>
Amortisasi	Rp	37.640.625
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	Rp	<b>22.614.375</b>

*Aset Lain-Lain*  
*Rp.0,-*

#### **C.4.2 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2021 adalah Rp.0,- dan Rp.0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (Administrasi Hukum Umum) serta dalam proses

penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Mutasi tambah:</b>		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	-
<b>Mutasi kurang:</b>		
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp	-
- Transfer keluar (BMN yang dihentikan)	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan	Rp	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp.0,-*

### **C.4.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Kewajiban jangka pendek Rp. 0,-*

### **C.5 Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

Uang Muka dari  
KPPN Rp. 0,-

### C.5.1 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2023 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan sudah disetorkan ke Bendahara Umum Negara.

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (Administrasi Hukum Umum) adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN*

No	Uraian	Tahun 2023
1	Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta (AHU dan BHP)	-
Jumlah		-

Utang kepada  
Pihak Ketiga Rp.  
92.315.956.860,-

### C.5.2 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 92.315.956.860,- dan Rp. 0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (Administrasi Hukum Umum) per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga*

No	Uraian	Jumlah
	Rek Pihak ketiga dan pailit (BHP)	Rp 92.315.956.860
<b>Total</b>		<b>Rp 92.315.956.860</b>

*Pendapatan  
Diterima di  
Muka Rp.0,-*

### **C.5.3 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

#### *Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka*

Uraian	Jumlah	Penjelasan
	-	
<b>Total</b>	<b>-</b>	

*Beban yang  
Masih harus  
Dibayar Rp.0,-*

### **C.5.4 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan Keuangan Tingkat Wilayah belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

#### *Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan TA 2022*



Keterangan	T A 2023	T A 2022
	-	-
Jumlah	-	-

*Ekuitas Rp.*

*9.758.991.348,-*

### **C.7 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.758.991.348,- dan Rp. 10.127.155.893,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

*Pendapatan  
PNBP Rp. 0,-*

### **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.,- dan Rp. 2.823.251.484,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester II Tahun  
Anggaran 2023 Audited dan 2022*

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	2.823.251.484	
<b>Jumlah</b>	-	<b>2.823.251.484</b>	

*Beban Pegawai Rp.  
2.187.972.234,-*

### **D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.187.972.234,- dan Rp. 2.178.879.664,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan

modal.

*Rincian Beban Pegawai Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	T A 2023	T A 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pegawai	2.187.972.234	2.178.879.664	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.187.972.234</b>	<b>2.178.879.664</b>	<b>-</b>

*Beban Persediaan  
Rp.201.335.204,-*

### **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 201.335.204,- dan Rp. 161.290.752,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan konsumsi	201.335.204	161.290.752	2483%
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>201.335.204</b>	<b>161.290.752</b>	<b>2483%</b>

*Beban Barang dan Jasa  
Rp.5.398.926.184,-*

### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing

sebesar Rp. 5.398.926.184,- dan Rp. 5.836.680.389,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022*

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun
Beban Keperluan Perkantoran	909.034.880	827.822.337	109,81
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	93.053.809	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18.610.680	19.218.572	
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	127.080.000	127.680.000	99,53
Beban Barang Operasional Lainnya	42.037.238	18.181.230	231,21
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	260.000	1.445.000	
Beban Bahan	427.666.479	457.503.686	
Beban Honor Output Kegiatan	685.000.000	690.250.000	
Beban Barang Non Operasional Lainnya	777.507.324	591.967.634	
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	10.212.000	72.415.195	
Beban Langganan Listrik	144.497.112	37.154.220	
Beban Langganan Telepon	222.093	395.758	
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	35.964.000	142.307.000	
Beban Sewa	796.380.000	1.529.357.321	28,38
Beban Jasa Profesi	69.700.000	75.400.000	
Beban Jasa Lainnya	1.354.753.976	1.089.894.201	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.398.925.782</b>	<b>5.774.045.963</b>	<b>-6,50</b>

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp.505.605.830,-*

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.505.605.830,- dan Rp. 369.629.878,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan Semester II  
Tahun Anggaran 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan	505.605.830	369.629.878	-
<b>Jumlah</b>	<b>505.605.830</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

*Beban Perjalanan*

*Dinas*

*Rp.3.727.306.923,-*

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.727.306.923,- dan Rp. 2.735.607.422,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II Tahun Anggaran  
2023 Audited dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.846.811.263	1.394.807.423	32,41
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	277.340.000	262.648.000	5,59
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	352.294.300	465.874.670	-24,38
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.250.861.360	612.277.329	104,30
<b>Jumlah</b>	<b>3.727.306.923</b>	<b>2.735.607.422</b>	<b>36,25</b>

*Beban Barang*

*untuk*

*Diserahkan*

*kepada*

*Masyarakat*

*Rp.0,-*

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada

masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Barang untuk diserahkan ke Masyarakat	0	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Beban Bantuan Sosial Rp. 0,-* **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial	0	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 887.113.087,-*

## **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 887.113.087,- dan Rp. 646.195.710,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan  
2022*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	648.183.210	468.200.790	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	219.616.634	162.938.670	-
Beban Penyusutan Irigasi			
Beban Penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	4.256.993	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	-	-	-
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>872.056.837</b>	631.139.460	-
Beban Amortisasi Aplikasi	15.056.250	15.056.250	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>15.056.250</b>	15.056.250	-
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>887.113.087</b>	646.195.710	-

*Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp.0,-*

## **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited

dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp. (18.611.111),-*

### **D.11 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022 adalah sebesar Rp. (18.611.111),- dan Rp (154.268.218),-

*Rincian Kegiatan Non Operasional Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022*

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	18.611.111	154.268.218	
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>18.611.111</b>	<b>154.268.218</b>	

*Defisit Pos Luar Biasa Rp.0,-*

### **D.12 Defisit Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022 adalah sebagai berikut:



*Rincian Pos Luar Biasa*  
*Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited dan 2022*

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
	0	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*

*Rp.*

*10.127.155.893,-*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.10.127.155.893,- dan Rp. 5.356.178.259,-.

*Defisit LO Rp.*

*(12.889.648.351,-)*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah defisit sebesar Rp. (12,889,648,351),- dan Rp. (8.950.764.113),-. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak*

*kumulatif*

*perubahan*

*kebijakan*

*akuntansi/kesa-*

*lahan*

*mendasar*

*Rp.0,-*

### **E.3.1 Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar**

Tidak terdapat transaksi dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

*Penyesuaian*

*Nilai Aset Rp.0,-*

### **E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai penyesuaian nilai asset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyesuaian nilai asset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir..

*Koreksi Nilai*

*Persediaan*

*Rp.0,-*

### **E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk Semester II Tahun Anggaran

2023 Audited dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Rincian untuk Semester II Tahun Anggaran 2023 Audited adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Atas Persediaan*

Jenis Persediaan	Koreksi
koreksi nilai persediaan	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Selisih  
Revaluasi Aset  
Tetap Rp. 0,-

**E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih revaluasi aset tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan nilai ulang aset tetap. Selisih revaluasi aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Rincian selisih revaluasi aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

*Rincian Selisih Revaluasi Aset  
Tetap*

Jenis Persediaan	Koreksi
peralatan dan mesin	
koreksi nilai saldo awal	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Aset  
Tetap Non  
Revaluasi Rp. 0

**E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi aset tetap non revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Lain-lain Rp. 0,-

### E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait barang milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan hutang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Jenis Persediaan	Koreksi
koreksi beban	-
koreksi pendapatan	-
koreksi piutang	-
koreksi kewajiban	-
koreksi hibah	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Transaksi antar entitas Rp. 12.521.483.806,-

### E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 12.521.483.806,- dan Rp. 13.721.741.747,-. Rincian transaksi antar entitas terdiri dari

Jenis Persediaan	Koreksi
diterima dari entitas lain	-
ditagihkan ke entitas lain	12.521.483.806
transfer masuk	-
transfer keluar	-
pengesahan hibah langsung	-
pengesahan pengembalian hibah langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>12.521.483.806</b>

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) Rp.0,-

#### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp.0,- sedangkan DKEL sebesar Rp.0,-

Transfer Masuk/  
Transfer Keluar  
Rp. 90.096.650

#### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 90.096.650,-. Yang terdiri dari 2 pembatas segitiga merah 8 unit senilai Rp170.000 ,-, stemple direktorat 1 unit senilai Rp193.000, blanko sertifikat apostile sebanyak 7.250 lembar terdiri dari 3.250 lembar senilai Rp12.000,- dan 4000 lembar senilai Rp12.250,- dan stiker security blanko sebanyak 9 unit dengan harga Rp38.850,-

#### E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah  
Langsung dan  
Pengembalian  
Pengesahan Hibah  
Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,- dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang Semester II tahun 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas.

Rincian Pengesahan Hibah untuk Semester II tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	Kanwil Kemenkumham AHU	Uang	Rp -
		Barang	Rp -
2	Kanwil Kemenkumham AHU	Uang	Rp -
<b>Total Pengesahan</b>			<b>Rp -</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
<b>Jumlah</b>			<b>Rp -</b>

Rincian Penerimaan Hibah Langsung per Satker Semester II tahun 2022 disajikan pada lampiran.

*Ekuitas Akhir*

*Rp.*

*9.758.991.348,-*

## **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.758.991.348,- dan Rp. 10.127.155.893,-.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **Terlampir**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca Per 31 Desember 2023.